

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iran adalah salah satu dari Negara-negara di timur tengah (*middle east*) beribukota di Teheran. Nama Iran sudah ada sejak zaman kuno akan tetapi sejak tahun 1935 Iran masih dipanggil dunia Barat dengan nama Persia. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Syah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut dapat digunakan sebagai Identitas nama Iran. Iran memiliki arti ‘‘ Tanah Bangsa Arya’’. Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia(35 km) di Barat laut, laut Kospia di Utara, Pakistan (909 km) dan Afghanistan (936 km) di Timur , Turkmenistan(1000 km) di Timur laut, Perairan Teluk Oman dan juga Teluk Persia di Selatan, dan Turki (500 km) dan Irak di barat (1,458 km)¹. Dibawah ini adalah foto negara Iran:



Bentuk Negara Iran adalah kesatuan. Perubahan – perubahan konstitusi dan institusi secara substantif dilakukan

¹ Andini, M. N. (2016). <http://repository.unhas.ac.id>. Dipetik 4 9, 2017, dari <http://repository.unhas.ac.id>

² Kompas.com. (2020, Januari 8). *Iran, Negara kaya sumber daya yang kerap konflik*. Dipetik April 11, 2021, dari Kompas.com:

dengan pemilihan. Bentuk Pemerintahan Iran adalah Republik Islam, bentuk pemerintahan tersebut sudah disepakati oleh masyarakat melalui Referendum yang diadakan pada Tahun 1979. Sistem pemerintahan Republik Islam sangat berbeda dengan sistem pemerintahan di Negara – negara berkembang di Timur tengah lainnya ataupun Negara – negara maju. Sebab Negara Republik Islam Iran menggunakan sistem Pemerintahan *wilayatul faqih* pasca revolusi Islam Iran pada 1979. Iran sudah mengalami tujuh kali pergantian Pemimpin/presiden yang setiap presidennya memiliki keadaan politik internasional yang selalu berubah, namun pada pelaksanaannya politik luar negeri, Iran tetap tidak lepas dari Jalur *wilayatul faqih* yang sudah ditetapkan Ayatollah Khomeini saat membentuk negara Iran pasca revolusi.

Iran memiliki kebijakan luar negeri yang memprioritaskan hubungan dengan tetangga-tetangganya dan juga Negara-negara Islam. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatollah Al-Udhma Sayid Ali Khamenei. Dalam Menjalin Hubungan diplomatik harus tetap menjunjung nilai-nilai dan prinsip yang sudah disepakati secara non-formal oleh semua Negara. Ditengah masyarakat dunia, Iran termasuk negara yang sudah dikenal dengan Negara merdeka yang pantang tunduk terhadap dominasi asing dan juga menjadi model sebuah pemerintahan agamis yang berbasis kerakyatan. Politik luar negeri Iran berprinsip aspirasi pemerintahan Islam tanpa mengabaikan kehormatan hak bangsa-bangsa lain yang justru sangat konsen/terfokus terhadap perjuangan bangsa tertindas. (Zuledy, 2015)

Sebagai sebuah negara yang berdaulat sudah wajar bahwa Iran pasti mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara lain salah satunya yakni adalah Yaman. Kedekatan Iran dan Yaman sudah mulai terlihat semenjak Revolusi Islam tahun 1979 dan Iran telah membuka kedutaan besarnya di sana'a sejak tahun 1972. Kedekatan kedua negara ditandai dengan dukungan yang diberikan pemerintah Yaman atas revolusi Iran pada tahun 1979. Demikian pula sebaliknya pada penyatuan yang terjadi antara Yaman utara dan Selatan tahun

1990, Iran menunjukkan sikap persahabatan dengan menjadi negara pertama yang mengakui penyatuan pemerintahan Republik Yaman. Pada perang yang menuntut pemisahan diri pada tahun 1994, Iran juga memihak pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh melawan kelompok Separatis Yaman Selatan. Dukungan yang diberikan berupa sebuah ucapan selamat karena keberhasilannya dalam mengatasi kelompok separatis.

Kunjungan resmi diplomatik yang dilakukan oleh Presiden Ali Abdullah Saleh pertama kali ke Iran pada tahun 2000 yang pada waktu itu merupakan awal penting dinamika hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Berselang 3 tahun Presiden Iran Muhammad Khatami juga membalas tindakan presiden Ali Abudllah Saleh dan juga presiden Iran pertama yang datang mengunjungi Yaman pada tahun 2003 dan menandatangani 8 (delapan) dokumen kerjasama di berbagai hal, pada saat itu yang paling di prioritaskan adalah kerjasama dibidang keamanan. Kerjasama antara kedua negara menyangkut bidang akademis, politik, budaya, sains dan ekonomi. Pada saat itu kerjasama Iran dan Yaman melingkupi pengembangan ekspor dan impor, meningkatkan investasi, terkait stabilitas ekonomi dan perdamaian antar kawasan.

Hubungan kedua negara tidak bisa dikatakan sebagai hubungan dekat, karena pada waktu itu Iran bukan merupakan salah satu negara ekspor maupun impor utama Yaman dan juga berlaku sebaliknya. Akan tetapi kedua negara tersebut tetap menjaga hubungan baik. Seperti yang dikatakan menteri luar negeri Yaman Ali Muthana Hassan saat bertemu dengan menteri luar negeri Iran manouchehr Mottaki di ibuka Yaman Sana'a pada 12 mei 2009. Muthana menyatakan keinginan dari negaranya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Iran: "*We feel brotherhood and friendship with the great Iranian nation and we believe that Iran wants nothing but good for us and we want nothing but good for Iran*". (DomianMarket.com)

Pada Agustus 2009, Yaman mulai memanas dan munculnya pemberotak dari Yaman Utara, yaitu Pemberontak

Al-Houthi, yang pada waktu itu dipimpin oleh Hussein Al-Houthi. Para kelompok Houthi menganut aliran Syiah Zaidiyah (Zaidi). Gerakan kelompok Houthi ini memiliki tujuan pada saat itu untuk menggulingkan pemerintahan politik resmi di Yaman. Persiteganggan dan Bentrokan antara pasukan Yaman dan pemberontak Houthi sudah dimulai sejak pada tahun 2004. Berawal dari Hussein Al-Houthi mendirikan Gerakan Al-Syabab Al-Mukmin yang lahir pada 1997 dan bertujuan untuk menghidupkan kembali Zaidi Islam cabang Syiah, terutama di Yaman untuk melawan ideology sunni fundamentalis di daerah Yaman utara, yang didominasi oleh Zaidis. Konflik dimulai sebagai bentrokan terisolasi antara Gerakan Pemuda Mukmin Al-Houthi dan tentara di Sana'a.

Kegagalan pemerintahan Yaman dalam mengelola negara baik bidang ekonomi, keamanan, politik dan lainnya adalah faktor awal mula terjadinya pergerekan munculnya pemberontakan oleh sekelompok warga yang berhaluan Syiah, yakni Houthi. Lahirnya kelompok Houthi berawal mula dari keretakan hubungan antara ulama-ulama Syiah yang beraliran Zaidiyah dengan Badruddin al-Houthi. Menurut Badruddin Al-Houthi para ulama Zaidiyah telah menyisihkan bagian yang pokok dari ajaran Syiah. Sejak saat itu, Badruddin al-Houthi beralih ke aliran Imamah dan kemudian pergi ke Iran untuk mendalami pemahaman tersebut. (Charin, 2016)

Bersamaan kepergian Badruddin ke Iran, anak dari Badruddin yakni Husain bin Badruddin Al-Houthi mengundurkan diri dari partai al-haq, yakni partai yang mengaspirasi suara dan pemikiran ajaran Syiah Zaidiah. Setelah mengundurkan diri Husain kemudian mendirikan kelompok baru dengan nama Syiah Houthi dengan menisbatkan namanya pada kelompok tersebut. Kelompok ini bermula hanya berfokus pada bidang keagamaan, kemudian bergabung dengan pemerintah untuk melawan partai persatuan Yaman yang mana partai tersebut mewakili masyarakat yang bermazhab/ menganut ajaran Sunni. Pada 2002 kelompok Al-Houthi ini berbalik arah menjadi kelompok oposisi dalam pemerintahan. (Charin, 2016)

Pemberontak Syiah Houthi memanas kembali dalam kacamata politik internasional, terkait dengan konflik sektarian yang pada saat itu didukung oleh Iran yang terjadi pada tahun 2014. Waktu itu pimpinan pemberontakan AlHouthi yakni Abdul Malik Al Houthi dan bersama ribuan demonstran turun ke jalanan, untuk menuntut penjelasan pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Presiden Abdurabbuh Mansur Hadi yang pada saat itu melakukan pencabutan subsidi BBM yang sudah diberitahukan sebulan sebelumnya.

Pemerintah Yaman telah menyulut konflik dan alasan perang yang berbeda sejak pertempuran dimulai, tapi kali ini pemerintah Yaman memiliki kepercayaan, bahwa keberadaan sebuah kawasan/daerah yang diperintah oleh orang Zaidi, dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan rezim Presiden Ali Abdullah Saleh. Tetapi menurut sudut pandang kaum Zaidi di Sa`ada merasa bahwa mereka sebagai masyarakat yang tengah diserang dan budayanya akan terancam punah..

Datang sebuah pengakuan dari seorang Rajeh Badi, salah seorang yang di utus Al Houthi ke Iran pada awal Maret 2015, yang menyatakan bahwa para kelompok Syiah Al Houthi yang saat ini secara de facto sudah memegang kekuasaan di Yaman sebagai pemerintahan selain itu juga mengaku mendapatkan bantuan ekonomi dan persenjataan dari negara Iran. Datang sebuah komitmen dari Iran untuk membantu perekonomian Yaman dengan membangun pembangkit listrik dan bahan bakarnya untuk kebutuhan selama setahun, serta dukungan di bidang militer. Pernyataan tersebut semakin diperjelas, dengan indikasi yang kuat, adanya dukungan Iran terhadap pemberontak Al-Houthi. Di antaranya, banyaknya ditemukan senjata yang digunakan oleh pemberontak Al-Houthi yang merupakan made in Iran. Dan juga adanya bantuan berupa pelatihan militer yang dilakukan oleh Iran terhadap kelompok pemberontak tersebut.

Iran dengan ideologinya merupakan negara yang cukup berpengaruh seperti Arab Saudi di kawasan Timur Tengah, bukan hanya itu, bahkan Iran selalu tidak pernah berhenti dalam

Upaya memperluas pengaruhnya di kawasan ini. Di hampir setiap konflik yang terjadi di daerah atau kawasan Timur Tengah, Iran bahkan tidak hanya melihat tetapi tidak pernah tinggal diam dan Iran selalu mengambil kesempatan untuk masuk terlibat dalam negara yang bertikai tersebut. Telah banyak usaha Iran dalam mencapai kepentingannya di segala penjuru Timur Tengah, melalui diplomasi maupun militer. (Andini, 2016)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, peneliti bertujuan untuk meneliti **“Mengapa Iran mendukung Kelompok Al-Houthi di Konflik yang terjadi di Yaman periode tahun 2009-2015?”**.

C. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk menganalisa dan menjawab permasalahan dalam research question menuliskan karya ilmiah ini, penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional.

Menurut Hans J. Morgenthau di dalam “The concept of Interest difined in terms of power”,konsep kepentingan nasional (nasional interest) yang didefinisikan dalam istilah yakni “power” menurut morgenthau berada diantara akal,nalar atau “reason” yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dipahami dan dimengerti. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional. (Jemadu, 2008)

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara berperan sebagai aktor utama di dalam siklus politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kebutuhan atau kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan

ke dalam konsep “power” kepentingan ”interest” didefinisikan ke dalam terminologi power.

Ada kepentingan nasional yang bersifat vital bagi suatu negara karena terkait dengan eksistensinya. Untuk tetap berdiri sebagai sebuah negara berdaulat maka suatu negara harus mempertahankan kedaulatan atau yurisdiksinya dari campur tangan asing. Selain itu negara itu berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayah (territorial integrity) sebagai wadah bagi entitas politik tersebut. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan berjalannya kelangsungan hidup Negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Kalau kepentingan vital atau strategis suatu negara menjadi taruhan dalam interaksinya dengan aktor-aktor lain, maka negara tersebut akan menggunakan segala instrumen atau kekuatan yang dimilikinya untuk mempertahankan kepentingan vital atau strategis tersebut.

Kepentingan nasional merupakan konsep kunci dalam segala kebijakan yang dilakukan oleh sebuah negara kepada negaa lain dan merupakan tujuan umum yang akan teruskan berkesinambungan agar suatu negara dapat bertindak. Oleh karenanya dapat disebutkan bahwa kepentingan nasional itu merupakan aspirasi sebuah negara dan dari kepentingan tersebut dapat diambil langkah-langkah kebijaksanaan terhadap lingkungan tempat berinteraksinya negara tersebut. Pengertian kepentingan nasional itu sendiri seperti yang di ungkapkan oleh Nasrun :

Kepentingan nasional biasanya meliputi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan wilayah dan bangsa, kehidupan ideology politik, kehidupan sosial budaya, kehidupan ekonomi, kehidupan pertahanan untuk keamanan, dan kemampuan politik luar negeri dan diplomasi. Dari hal ini sudah jelas bahwa kepentingan nasional bersifat dimensional dan masing-masing dari dimensi berkaitan secara sistematis dalam aplikasinya.

Para ilmuwan realis mengatakan bahwa meskipun Negara dapat memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi itu

sangat bergantung pada tindak tanduk negara itu. Karena kepentingan Nasional seperti layaknya rasa lapar pada manusia juga merupakan kepentingan secara alamiyah untuk suatu negara, yang dengan semampunya akan diusahakan oleh negara.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kalevi Jaakko Holsti bahwa :

Istilah Kepentingan Nasional berkaitan dengan beberapa cita-cita atau tujuan suatu bangsa, yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan Negara-negara lainnya dengan kata lain, Gejala tersebut tidak lebih merupakan suatu normatif, konsep umum Kepentingan Nasional arti kedua yang sama pentingnya biasa bersifat deksriptif, dalam pengertian deskriptif, Kepentingan Nasional dianggap sebuah tujuan yang harus dicapai suatu negara bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. (Repository UNPAS, 2019)

Dalam pengaplikasian .Konsep ini digunakan untuk membantu menjawab alasan-alasan yang dapat di simbulkan Mengapa Iran mendukung Suku Al-houthi dalam konflik dengan Pemerintah Yaman.

D. Hipotesis

Setelah membahas tentang teori yang cocok untuk dipakai dalam menjawab rumusan masalah dalam karya ilmiah ini, penulisa mencoba memberikan hasil sementara dari rumusan masalah tersebut. Alasan Iran mendukung Kelompok Al-Houthi di konflik yang terjadi di Yaman pada periode tahun 2009-2015 karena,

- 1. Iran menginginkan control terhadap akses untuk sumberdaya alam Minyak yang melewati Selat Bab AL Mandeb.**
- 2. Iran bertujuan untuk untuk menyebarkan paham Syi'ah ke negara Yaman melalui Kelompok Al-houthi.**

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui alasan kenapa Iran mendukung kelompok Al-houthi di yaman. Keuntungan apa saja yang akan didapat Iran dari konflik tersebut.

F. Jangkauan Penelitian

Seperti yang tertulis di rumusan masalah dan agar jangkauan penulisan skripsi tidak meluas. Penulis membatasi penulisan skripsi, sesuai dengan topik permasalahan dan tema yang ada. Oleh karena itu pembahasan skripsi ini di fokuskan pada upaya dan Upaya Iran dalam konflik antara kelompok Al-houthi dengan Pemerintahan Yaman . Sedangkan untuk focus kajian di tekankan pada tahun 2009-2015. Dimana mulai terjadi arab spring pada saat itu.

G. Metodologi Penelitian

Dilihat dari judul yang di angkat oleh penulis “Dukungan Iran Terhadap Kelompok Al-Houthi di Konflik Yaman“, maka penulis memutuskan untuk tidak menggunakan metodologi secara kuantitatif akan tetapi menggunakan metodologi analisa secara kualitatif, yaitu adalah analisa dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi yang sudah ada melalui studi pustaka, dari bermacam-macam sumber yang sudah ada seperti berita, internet, majalah, jurnal, surat kabar, buku dan dari sumber-sumber lainnya yang dapat membantu dalam penulisan skripsi. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan bantuan dari fasilitas perpustakaan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal sistematika maka penulisan akan membagi pembahasan menjadi 4 (Empat) bab atau bagian. Sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut.

BAB I merupakan ringkasan dari keseluruhan bab atau bagian yang ada, berisi pendahuluan, dimana dalam pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Politik luar negeri Iran dan tujuan ideologinya serta faktor potensi geopolitik.

BAB III konflik yang terjadi antara Al-Houthi dengan pemerintah Yaman serta bentuk dukungan Iran terhadap Al-Houthi.

BAB IV merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dijelaskan sebelumnya.